

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan mendukung penelitian terdahulu yaitu:

1. (Khoir, Maesaroh, & Subowo, 2025), penelitian tersebut berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata Berbasis Religi Nyatnyono”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam pengembangan aksesibilitas Desa wisata berbasis religi Nyatnyono. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut mengacu pada teori Syafri yang membagi peran pemerintah Desa menjadi empat fungsi, yaitu pelayanan, regulasi, pemberdayaan dan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mammo telah melaksanakan keempat fungsi tersebut. Faktor pendukung berasal dari masyarakat dan pemerintah. Namun, fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek aksesibilitas wisata berbasis religi, sehingga belum mengkaji secara mendalam pengelolaan objek wisata alam secara umum.
2. (Iswanti & Zulkarnaini, 2022), penelitian ini yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah

Desa dalam pengembangan wisata pulau tilan dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata pulau tilan di kepenghuluhan rantau bais kecamatan tanah putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori Pitana dan Gayatri yang menekankan tiga indikator peran pemerintah Desa yaitu motivator, fasilitator dan dinamisator. Temuan dari hasil penelitian tersebut yaitu peran pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata Pulau Tilan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat sedikit kekurangannya, sehingga masih dikatakan belum maksimal. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam konteks wisata bahari, namun belum menyoroti secara spesifik tantangan pengelolaan wisata berbasis alam di wilayah pedesaan dengan keterbatasan fasilitas dan keberlanjutan kawasan.

3. (Febriansyah Yona Alvianto, 2021), penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Pakuncen”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata di Desa Pakuncen Kauman. Penelitian tersebut diangkat dengan menggunakan teori struktural fungsional dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan metode Miles and Hubermans untuk analisis datanya. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Integritas antar pemerintah dan masyarakat yaitu dengan berfokus memunculkan ciri khas yang ada di Desa Pakuncen; 2) Faktor penghambat

yaitu dari segi ekonomi atau pendanaan dan faktor pendukung yaitu adanya feedback baik berupa dukungan dari masyarakat tentang rencana hingga pembangunan Desa Wisata Religi ini; dan 3) Pemerintah harus segera meresmikan legalitas tempat wisata religi bukan hanya secara adat namun juga secara hukum. Meskipun demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek wisata religi dan kelembagaan, sehingga belum mengulas secara rinci peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata alam berbasis potensi lokal.

4. (Smesta, Khadijah, & Pamungkas, 2025), penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Nagrog dalam pengembangan Desa Wisata Nagrog di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nagrog memiliki peran strategis dalam pengembangan Desa wisata dengan memperkuat koordinasi bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum, serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan BUMDes. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana peran tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan objek wisata alam tertentu.

5. (Sawir, 2020), penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa Lalos dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Batu Bangga”. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa peran perencanaan, peran kebijakan serta peran pembuatan dan penegakan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah lalos dalam rangka mengembangkan objek wisata pantai Batu Bangga belum berjalan sebagaimana mestinya, sementara untuk peran pembangunan prasarana sudah terlaksana dengan baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah desa tidak selalu berjalan ideal dan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sumber daya.

Tabel 2.1 Relevansi Penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Khoir, Maesaroh, & Subowo, 2025)	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Aksesibilitas Desa Wisata Berbasis Religi Nyatnyono”.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mammo telah melaksanakan keempat fungsi tersebut.	Penelitian ini berkaitan karena sama-sama menelaah peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata.	Perbedaan yang terletak pada objek dan fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada wisata religi dan aspek aksesibilitas sedangkan penelitian ini

					mengkaji peran pemerintah Desa dalam pengembangan Objek Wisata Riam Bidadari.
2.	(Iswanti & Zulkarnaini, 2022)	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”.	Temuan dari hasil penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan objek Wisata Pulau Tilan Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat sedikit kekurangannya, sehingga masih dikatakan belum maksimal.	Penelitian ini memiliki kesamaan tema karena membahas peran pemerintah Desa dalam pengembangan destinasi wisata.	Penelitian tersebut membahas peran pemerintah Desa dalam pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan, sedangkan penelitian ini mencakup dinamika pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Desa Lumbang.
3.	(Febriansyah Yona Alvianto, 2021)	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di	Hasil penelitian ini yaitu: 1) Integrasi antar pemerintah dan masyarakat	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek legalitas destinasi

		Pakuncen” .	yaitu dengan berfokus memunculkan ciri khas yang ada di Desa Pakuncen; 2) Faktor penghambat yaitu dari segi ekonomi atau pendanaan dan faktor pendukung yaitu adanya feedback baik berupa dukungan dari masyarakat tentang rencana hingga pembangunan Desa Wisata Religi ini; dan 3) Pemerintah harus segera meresmikan legalitas tempat wisata religi bukan hanya secara adat namun juga secara hukum.	sama-sama membahas keterlibatan atau peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata.	wisata dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pakuncen. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah Desa dalam pengembangan wisata Riam Bidadari.
4.	(Smesta, Khadijah, & Pamungkas, 2025)	“Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nagrog memiliki peran strategis dalam	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama membahas	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek legalitas destinasi wisata dan dukungan

		Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya”.	pengembangan Desa wisata dengan memperkuat koordinasi bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menetapkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum, serta membangun infrastruktur pendukung pariwisata. Namun, pengembangan Desa wisata masih menghadapi tantangan seperti tidak adanya perencanaan jangka panjang, dukungan yang terbatas terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta strategi promosi yang belum optimal.	keterlibatan atau peran pemerintah Desa dalam pengembangan potensi wisata.	masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pakuncen. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pemerintah Desa dalam pengembangan wisata Riam Bidadari.
5.	(Sawir, 2020)	“Peran Pemerintah	Hasil penelitian	Penelitian ini sama-	Penelitian terdahulu

		h Desa Lalos dalam Mengembangkan Objek Wisata Pantai Batu Bangga”.	menunjukkan peran perencanaan, peran kebijakan sarta peran pembuatan dan menegakkan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lalos dalam rangka mengembangkan objek wisata pantai Batu Bangga belum berjalan sebagaimana mestinya, sementara untuk peran pembangunan prasarana sudah terlaksana dengan baik.	sama mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana diteliti dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Batu Bangga.	belum menyoroti pola peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Riam Bidadari, sehingga penelitian penulis memberikan kontribusi empiris pada konteks yang dan lokasi yang berbeda.
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian pada Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan objek wisata desa, baik sebagai perencana, pengambil kebijakan, Regulator, Motivator dan Fasilitator pembangunan pariwisata. Berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan objek wisata desa sangat dipengaruhi oleh koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat,

Pokdarwis, BUMDes, serta dukungan regulasi dan pembangunan infrastruktur.

B. Landasan Teori

1. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama Herbert A. Simon (1999:3) dalam (Pasolong, 2019). Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafi’ie dkk. (1999:18) dalam (Pasolong, 2019), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Chandler & Plano dalam Keban (2004:3) dalam (Pasolong, 2019), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik merupakan konsep yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara dan memenuhi kepentingan masyarakat. Menurut (Pasolong, 2019) administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan

publik secara efisien dan efektif. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa administrasi publik berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola organisasi, sumber daya, dan kebijakan publik untuk memberikan pelayanan serta mendorong pembangunan.

Paradigma Administrasi Publik, Menurut Denhardt dan Denhardt (2007) dalam (Rahayu & Juwono, 2019) membagi perkembangan birokrasi ke dalam tiga paradigma, yaitu paradigma Administrasi Negara Tradisional/*Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *paradigma New Public Service* (NPS).

Jenis Paradigma Administrasi Publik yaitu:

a. Birokrasi dalam Paradigma Administrasi Negara Tradisional/*Old Public Administration* (OPA)

Weber (1947) menjelaskan bahwa birokrasi dalam OPA dicirikan oleh pembagian kerja yang jelas, sistem hierarki kewenangan, serta aturan formal sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama paradigma ini adalah efisiensi internal organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

b. *Paradigma New Public Management* (NPM)

Para ahli menyadari bahwa paradigma OPA terdapat banyak kelemahan. Dari sinilah muncul paradigma baru yang mencoba memberi kritik atas paradigma OPA dan sekaligus menawarkan solusi untuk menjalankan pemerintah dengan cara yang lebih baik. Paradigma ini dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM). Denhardt dan

Denhardt (2007:12) menyebutkan bahwa NPM mengacu kepada sekumpulan ide dan praktik kontemporer yang mencoba untuk menerapkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam sektor bisnis ke dalam sektor publik.

c. *Paradigma New Public Service (NPS)*

NPS lahir sebagai jawaban atas berbagai kritik yang muncul dalam paradigma NPM. Tokoh dibalik lahirnya NPS adalah Janet Vinzant Denhardt dan Robert B. Denhardt. Dalam NPS, birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan pelayanan yang memadai dimana masyarakat dianggap sebagai warga negara sepenuhnya bukan sebagai pelanggan. Selain itu, birokrasi harus mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga negara, berpikir strategis dan bertindak demokratis, serta memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada.

Paradigma administrasi publik tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan peran pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata Riam Bidadari. Melalui pendekatan New Public Management, pemerintah Desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan objek wisata dengan berorientasi pada hasil, kinerja, serta optimalisasi sumber daya Desa. Sementara itu, melalui pendekatan New Public Service, pemerintah Desa mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata, menjaga transparansi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah Desa dan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan objek wisata tidak hanya berorientasi pada

keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Desa.

Menurut (Hood, 2015), New Public Management menekankan pada efisiensi, pengukuran kinerja, serta penggunaan praktik manajerial sektor swasta dalam sektor publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui mekanisme yang berorientasi hasil.

Sementara itu, (Denhardt & Denhardt, 2015) menegaskan bahwa dalam paradigma New Public Service, pemerintah harus mengutamakan nilai-nilai demokrasi, partisipasi publik, serta kepentingan bersama dibandingkan orientasi pasar. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat.

2. Dimensi Administrasi Publik

Dimensi administrasi publik merupakan aspek-aspek strategis yang membentuk dan memengaruhi penyelenggaraan administrasi publik dalam suatu negara. Dimensi ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administratif semata, tetapi juga mencakup proses kebijakan, pengelolaan organisasi, etika, lingkungan, serta pertanggungjawaban kinerja. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, administrasi publik dapat dipandang secara komprehensif sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Salah satu konsep yang cukup komprehensif mengenai dimensi administrasi publik dikemukakan oleh Yeremias T. Keban dalam bukunya Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Menurut (Keban, 2014) administrasi publik harus dilihat setidaknya-tidaknya dari enam dimensi strategis sebagai berikut:

a. Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.

b. Dimensi Struktur Organisasi

Dimensi struktur organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia, yang memiliki peran dan fungsi tersendiri, dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak.

c. Dimensi Manajemen

Dimensi Manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung

dan urat nadi yang menyalurkan darah keseluruh tubuh termasuk ke organ-organnya agar dapat bergerak dan berfungsi.

d. Dimensi Etika

Dimensi Etika memberikan tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang buruk. Ini diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia.

e. Dimensi Lingkungan

Dimensi Lingkungan adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral. Hal ini diibaratkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi dimana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Mana kala iklim atau suhu serta lokasi kurang cocok dengan tubuh manusia maka tubuh tersebut akan sakit atau terhambat untuk berkembang. Iklim ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Karena itu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan menjadi sangat vital.

f. Dimensi Administrasi Kinerja

Dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara.

Menurut (Peters, 2018), administrasi publik modern tidak hanya dipengaruhi oleh struktur internal organisasi, tetapi juga oleh dinamika eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, dimensi administrasi publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.

3. Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa

Pemerintahan merupakan suatu sistem atau proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, serta melayani kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Nurcholis, 2011), pemerintah Desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan kewenangan yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan Desa memiliki otonomi lokal, tetapi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nurcholis, 2011).

Pemerintah adalah organisasi atau unsur yang menjalankan kewenangan negara dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks desa, (Nurcholis, 2011) menjelaskan

bahwa pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa merujuk pada sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan di Desa, sedangkan pemerintah Desa adalah pelaku atau unsur yang menjalankan sistem tersebut (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan pandangan (Nurcholis, 2011), ciri-ciri pemerintahan desa antara lain:

- a. Merupakan sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
- b. Melibatkan unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Memiliki kewenangan lokal berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
- d. Menjalankan fungsi pengaturan, pengurusan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- e. Bersifat otonom, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- f. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.

Sementara itu, ciri-ciri pemerintah desa menurut (Nurcholis, 2011) adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur atau pelaku utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa.
- 3) Bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Berperan sebagai pelaksana kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan.
- 5) Berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
- 6) Menjadi penggerak utama pembangunan dan pengelolaan potensi desa.

Menurut (Prasojo, 2017), penguatan kapasitas pemerintah desa sangat penting dalam mendukung keberhasilan otonomi desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pelayanan publik. Pemerintah desa dituntut memiliki kemampuan manajerial dan inovasi dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

4. Peran Pemerintah Desa

Peran adalah seperangkat perilaku, tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau lembaga sesuai dengan kedudukan dan statusnya dalam suatu sistem sosial (Biddle & Thomas, 1966).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola dan menjalankan urusan publik demi tercapainya ketertiban, kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum. Menurut (Ndraha, 2003), pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan negara atau masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai pengarah dan pengendali dalam proses pembangunan di berbagai tingkatan wilayah.

Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah di tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh (Biddle & Thomas, 1966), peran pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu:

a. Peran sebagai Regulator

Pemerintah desa berperan dalam menyusun, menetapkan dan melaksanakan peraturan serta kebijakan desa sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Peran ini bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian hukum dan arah pembangunan desa.

b. Peran sebagai Motivator

Pemerintah desa berperan mendorong dan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Melalui peran ini, pemerintah desa membangkitkan kesadaran, semangat dan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi desa.

c. Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah desa berperan memfasilitasi masyarakat dengan menyediakan sarana, prasarana serta dukungan administratif dan teknis guna menunjang kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pihak lain yang terkait.

Menurut (Dwiyanto, 2017), peran pemerintah dalam pelayanan publik tidak hanya sebatas regulator, tetapi juga sebagai katalisator yang mampu mempercepat pembangunan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

5. Pariwisata dan Objek Wisata

a. Pariwisata

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pariwisata memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan kegiatan yang beragam, tidak hanya perjalanan wisata semata.
- 2) Didukung oleh fasilitas dan layanan dari berbagai pihak.
- 3) Melibatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
- 4) Bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

b. Objek Wisata

Objek Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik, keunikan, dan nilai tertentu yang dapat menarik kunjungan wisatawan untuk tujuan rekreasi, pendidikan maupun hiburan (Yoeti, 2008).

Menurut (Yoeti, 2008), pengembangan suatu destinasi atau objek wisata sangat ditentukan oleh tiga komponen utama yang dikenal dengan konsep 3A, yaitu *attraction*, *accessibility* dan *amenities*.

1). *Attraction* (Daya Tarik Wisata)

Attraction merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai tertentu yang menjadi alasan utama wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata. Daya tarik tersebut dapat berupa

daya tarik alam, budaya maupun buatan manusia yang mampu memberikan pengalaman dan kepuasan bagi wisatawan.

2). *Accessibility* (Aksesibilitas)

Accessibility adalah kemudahan yang dimiliki wisatawan untuk mencapai suatu destinasi wisata. Aksesibilitas meliputi ketersediaan sarana transportasi, kondisi infrastruktur jalan, serta kemudahan akses menuju lokasi objek wisata yang mendukung kelancaran perjalanan wisatawan.

3). *Amenities* (Fasilitas Pendukung)

Amenities merupakan berbagai fasilitas pendukung yang disediakan di destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Fasilitas tersebut antara lain penginapan, rumah makan, toilet, tempat parkir serta fasilitas penunjang lainnya.

6. Pengembangan Objek Wisata

Menurut (Yoeti, 2008), pengembangan objek wisata merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik suatu objek wisata agar mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Menurut (Yoeti, 2008) pengembangan objek wisata mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam pengembangan objek wisata yang meliputi penyediaan fasilitas pendukung seperti jalan menuju lokasi wisata, tempat parkir, toilet, tempat istirahat serta fasilitas keselamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kepuasan wisatawan dalam berkunjung ke objek wisata.

b. Promosi

Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dan memasarkan objek wisata kepada masyarakat luas. Promosi bertujuan untuk meningkatkan daya tarik objek wisata serta mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui penyampaian informasi yang tepat mengenai keunggulan dan potensi objek wisata.

c. Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan objek wisata merupakan proses pengaturan dan pengendalian seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata. Pengelolaan yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar pengembangan objek wisata dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan.

d. Keterlibatan Masyarakat

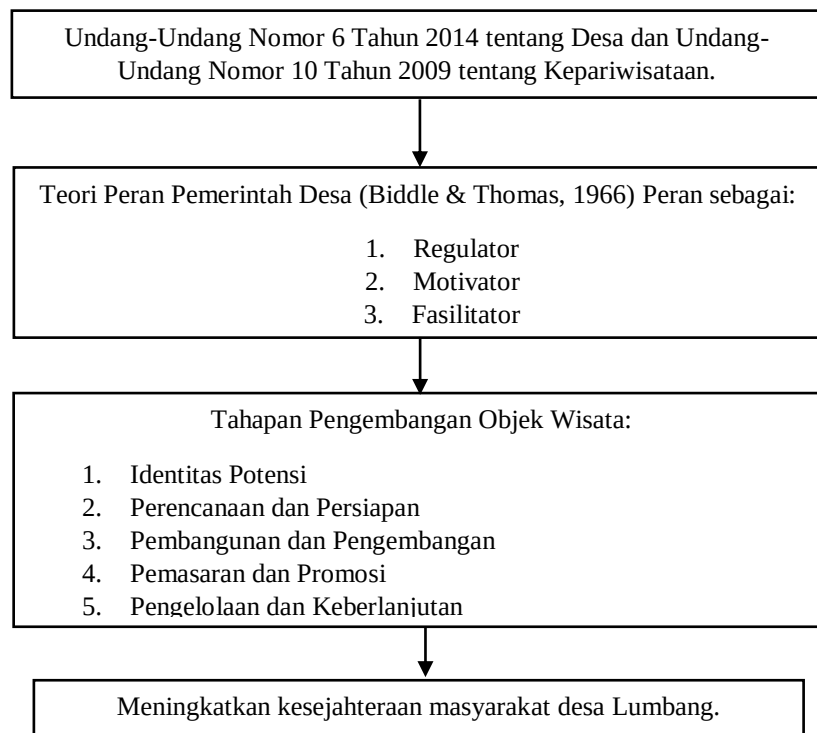
Keterlibatan masyarakat merupakan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata. Keterlibatan masyarakat penting

untuk menciptakan rasa memiliki terhadap objek wisata, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurut (Hall, 2019), pengembangan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tidak merusak potensi wisata dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian oleh (Timoty, 2020), menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas (community-based tourism).

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2025.